

DAFTAR PUSTAKA

- Altair, A. P. (2013, Juli 23). *Wah! 190 Perusahaan Terindikasi Tak Setor PPh Karyawan*. Diakses pada 24 Desember 2021, dari bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20130722/10/152238/wah-190-perusahaan-terindikasi-tak-setor-pph-karyawan>
- Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia. Diakses pada 1 Maret 2022, dari atpetsi.co.id: <https://atpetsi.or.id/perbedaan-pemotongan-dan-pemungutan-pajak>
- Dewinta, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Pajak Penghasilan*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Lebih Dekat Dengan Pajak*. 23.
- Hamidi. (2004). Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan. *Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press
- Hutagalung, D., & Waluyo, W. (2014). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Ukuran, Umur Dan Kepemilikan Perusahaan Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 1(2), 127. <https://doi.org/10.25105/jmat.v1i2.4935>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2019*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
- Resmi, Siti, (2011), *Perpajakan Teori Dan Kasus Empat*, Salemba Empat, Jakarta. Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Sari, O., Sitorus, F. Y., & Kennedy, P. S. (2018). Tinjauan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 21 oleh Wajib pajak Terdaftar dan Penerimaannya pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung. *Jurnal Ilmiah Buletin Ekonomi*, Vol.22 No.22.
- Setyaningrum, P dkk. (2019). *PPh 21 Final*. 0–43. KlikPajak.id
- Suryani, & Mariani, D. (2019). Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Leverage Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(3), 259–283.
- Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.850>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Watung, L. R. (2016). Analisis Penerapan Pajak dengan Withholding Tax System terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT. Bank Sulutgo di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, Vol.4 No.1: 916-923.

Zed, M. (2008). *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.